

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Pembangunan Jangka Panjang Kedua (PJP II), seperti diamanatkan dalam GBHN 1998 adalah mewujudkan bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera lahir batin sebagai landasan bagi tahap pembangunan berikutnya menuju masyarakat adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pembangunan menuju bangsa yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan jelas bukan merupakan sebuah proses yang mudah dilalui. Banyak tantangan dan agenda pembangunan yang mesti dijawab dan dituntaskan untuk mencapai kondisi tersebut. Seiring dengan dinamika pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat telah menumbuhkan aspirasi dan tuntutan baru dari masyarakat untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik. Aspirasi dan tuntutan masyarakat itu dilandasi oleh hasrat untuk lebih berperan dalam proses pembangunan yang tengah berlangsung.

Soemitro mengatakan bahwa :

“ Pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh manusia yang bertujuan mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur merata material dan spritual.”¹

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa pembangunan adalah suatu proses tindakan baik dari pemerintah maupun swasta yang meliputi segala segi kehidupan, sehingga segala kebutuhan terpenuhi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan perkembangan teknologi yang semakin maju.

¹ Soemitro, *Perkembangan Pembangunan*, PT Eresco, Surabaya, 1998, hal. 2

Untuk menangani pembangunan dimasa datang, tidak mungkin bertumpu pada potensi masyarakat secara alamiah, tapi juga diperlukan pembangunan yang teratur dan terarah, sehingga perkembangannya dapat diarahkan dalam keserasian dan keteraturan. Perkembangan yang pesat, memerlukan perencanaan yang lebih terpadu agar pertumbuhan dan perkembangannya bisa dikontrol dan diarahkan secara serasi dan seimbang.

Potensi yang dimiliki Kabupaten Magelang baik potensi pariwisata maupun potensi alam lainnya merupakan salah satu modal dalam pelaksanaan pembangunan yang penting untuk dimanfaatkan. Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Magelang telah berjalan dengan pesat, hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan yang cukup pesat dari berbagai bidang, baik itu pertumbuhan di bidang sosial, ekonomi, budaya, fisik maupun tata ruang.

Pertumbuhan fisik dapat terlihat dengan jelas terutama di perkotaan yang mengakibatkan kepadatan bangunan semakin meningkat, sehingga aspek pengaturan dan pengendalian bangunan serta lingkungannya juga harus ditingkatkan guna terciptanya keserasian pembangunan baik secara fisik maupun non fisik. Berkaitan dengan hal tersebut maka untuk mengimbangi perkembangan fisik dan untuk memberikan bimbingan serta pengawasan yang efektif atas kegiatan pembangunan maka Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Magelang mempunyai ruang yang cukup luas dalam pengaturan pendirian bangunan yang ada di wilayah tersebut. Berbagai upaya untuk mengendalikan pertumbuhan pembangunan yang berwawasan lingkungan telah digalakkan, diantaranya dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) yang mengarahkan letak bangunan

fisik dengan peruntukannya. Untuk mengendalikan pertumbuhan secara teratur telah diterbitkan pranata hukum yang berupa Peraturan Daerah Tingkat II Magelang No.5 Tahun 2000 tentang Bangunan dan Keputusan Bupati Magelang No. 188.4/367/Kep/14/2000 tentang Pedoman Dasar Untuk Penetapan Biaya Izin Bangunan Di Wilayah Kab. Magelang.

Peningkatan pembangunan fisik di wilayah Kecamatan Muntilan bila dikaitkan dengan letak geografisnya memang cukup beralasan. Karena mengingat wilayahnya merupakan jalur utama angkutan dari Daerah Istimewa Yogyakarta ke jurusan Semarang. Dengan pertumbuhan-pertumbuhan perubahan fisik terutama di sepanjang jalur protokol yang dimanfaatkan sebagai tempat usaha maupun tempat tinggal. Walaupun Peraturan Daerah sudah diterbitkan, tetapi dalam pelaksanaannya dapat dikatakan belum efektif.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tercantum sangsi bagi masyarakat yang melanggar IMB yaitu :

- a. Pencabutan izin bangunan
- b. Pengosongan bangunan
- c. Pembongkaran bangunan²

Namun sangsi yang tegas bagi para pelanggar bangunan belum sepenuhnya dilaksanakan. Pada saat ini aparat pemerintah baru melangkah hanya sebatas pada tindakan preventif berupa teguran secara tertulis kepada para pelanggar bangunan dan belum juga dapat dilaksanakan secara sempurna.³

² Sumber : Arsip DPU Kab. Magelang

³ Sumber : wawancara dengan Bp. Ratmanto staf DPU Kab. Magelang bab. Peraturan IMB

Dengan melihat hal tersebut, di Kecamatan Muntilan sebagian masih belum tertib perijinan, banyak bangunan yang berdiri tanpa ijin. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kemauan mengurus IMB adalah tingkat pendidikan warga masyarakat.

Kurangnya pendidikan dan pengetahuan penduduk akan menyebabkan tidak tertibnya perijinan bangunan dan akan terjadi banyak bangunan yang tidak terarah, terencana serta tanpa dapat terkendalikan.⁴ Maka disini pendidikan itu sangat ditekankan karena dengan pendidikan manusia dapat mencapai tujuan yang diinginkannya, seperti pendapat dari Vembrianto berikut ini :

“Tujuan pendidikan adalah membina manusia agar menjadi manusia yang berkepribadian, berkesadaran akan kebutuhan masyarakat dan berkemampuan membudayakan lingkungan alam sekitarnya”⁵

Ini berarti, bahwa pendidikan yang dicapai seseorang mampu mengembangkan bahkan mengubah pola pikirnya untuk bertindak yang menguntungkan bagi masyarakat termasuk bagi dirinya sendiri.

Pendidikan merupakan usaha sadar untuk membina kepribadian nasional dan mengembangkan kemampuan manusia baik jasmani maupun rohani untuk menciptakan pola tingkah laku tertentu.

Pendidikan sebagai wahana yang dapat mengangkat harkat martabat manusia baik dibidang sosial, ekonomi maupun budaya yang akan merupakan kunci untuk berkembang tidaknya suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Dan pendidikan merupakan suatu proses yang terjadi pada diri seseorang sebagai usaha mencari ilmu pengetahuan untuk meningkatkan sumber

⁴ Sumber : Data ini diperoleh dari hasil pengamatan secara langsung oleh penulis di lapangan.

⁵ Vembrianto, *Pendidikan Sosial*, Paramita, Yogyakarta, 1991, hal. 1

daya pribadinya. Usaha peningkatan sumber daya ini akan berlangsung seumur hidup dengan suatu tujuan mencapai keadaan yang lebih baik. Baik secara lahir maupun batin sehingga bermanfaat bagi masyarakat lebih luas.

Untuk melaksanakan pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga peran rakyat sangat diperlukan atau dibutuhkan demi suksesnya pembangunan tersebut. Dan salah satu bentuk peran serta masyarakat adalah dengan mengurus IMB dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Selama ini masyarakat kurang menyadari betul manfaat atau kegunaan dari IMB sehingga penerimaan dari sektor IMB ini masih relatif rendah untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mensosialisasikan manfaat atau kegunaan IMB beserta prosedur atau persyaratan melalui penyuluhan-penyuluhan. Selain itu untuk meningkatkan optimalisasi potensi penerimaan dari IMB perlu upaya dari pemerintah dalam memberi penjelasan yang baik dan terarah kepada masyarakat yang lebih awam. Tujuannya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat akan arti penting dari IMB, tanpa adanya kesadaran dari masyarakat maka hasil yang diperoleh dari kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah menjadi tidak optimal.

Di Kabupaten Magelang pengurusan IMB dibagi dalam dua tempat yaitu di masing-masing Kecamatan di Kabupaten Magelang bila luas bangunan kurang dari 100 m dan di DPU Kabupaten Magelang bila bangunan diatas 100 m. Adapun keuntungan yang akan diperoleh masyarakat dengan mengurus IMB adalah :

1. Memberikan status hukum yang kuat pada pemilik bangunan.

2. Mempermudah untuk mengurus perizinan lainnya.

3. Bisa dijadikan agunan di bank.⁶

Untuk menyebarluaskan informasi yang bertujuan menambah pengertian dan menumbuhkan kesadaran masyarakat diperlukan adanya sistem komunikasi yang efektif dan efisien.

Sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan mudah dan akan dipahami dengan mudah pula oleh masyarakat. Dengan informasi yang mudah untuk diterima dan dipahami, masyarakat tidak enggan untuk mencari informasi tentang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Dengan demikian antara informasi dan komunikasi bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan dalam konteks kehidupan sosial masyarakat. Susanto mengatakan bahwa informasi adalah unsur yang menjadi dasar komunikasi yang berhubungan antara komunikan dan komunikator.⁷

Pendapat yang lain dikemukakan oleh Kincaid dan Schramm :

“Informasi adalah setiap hal yang membantu kita tentang alam kehidupan. Dengan kata lain, informasi mengurangi keragu-raguan kita dalam situasi tertentu.”⁸

Dari pendapat tersebut dapat dijelaskan bahwa informasi dapat memberi seseorang untuk mengetahui suatu peristiwa atau mengurangi keragu-raguan suatu peristiwa dalam situasi tertentu.

Berdasarkan definisi yang telah diungkapkan diatas, dapat disimpulkan bahwa informasi sangat penting dalam kehidupan setiap orang, sebab tanpa

⁶ Sumber : Arsip DPU Kab. Magelang

⁷ Astrid Susanto, *Komunikasi dalam Teori dan Praktek*, PT. Bina Cipta, Surabaya, 1997, hal. 6

⁸ Kincaid D. Lawrence dan Schramm, *Wilbur, 1954, 1955 Komunikasi antar Manusia*, LBSES

informasi tidak akan muncul perubahan, padahal perubahan merupakan proses ke arah pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari IMB perlu disebarluaskan informasi kepada masyarakat umum.

Adapun alasan penulis mengangkat tingkat pendidikan sebagai variable bebas pertama dalam penelitian ini adalah karena usaha apapun yang akan ditempuh agar IMB dapat terlaksana, pada akhirnya sangat tergantung pada pendidikan yang dimiliki seseorang serta merupakan suatu kesadaran masyarakat. Jika masyarakat tidak mempunyai pendidikan yang cukup maka akan sulit untuk memahami arti penting dan kegunaan dari IMB.

Oleh karena itu, menurut penulis sangat tepat kiranya jika memilih faktor tingkat pendidikan sebagai variable bebas pertama yang berpengaruh dalam mengurus IMB. Kemudian sebagai alasan mengangkat faktor akses informasi sebagai variabel bebas kedua dalam penelitian ini adalah karena apapun kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, bila tidak diikuti dengan sosialisasi yang baik maka kecil kemungkinan akan berhasil dan mengena pada masyarakat. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban untuk menyampaikan kebijakan-kebijakan kepada masyarakat. Tak terkecuali kebijakan tentang IMB, pemerintah perlu mengadakan sosialisasi secara intensif dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan mengenai manfaat pentingnya mengurus IMB beserta prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat.

Seperti kita ketahui informasi tanpa didukung oleh komunikasi yang baik maka tujuan yang ada dalam informasi tersebut tidak dapat tercapai.

Dengan adanya alasan-alasan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis hanya mengangkat faktor tingkat pendidikan dan faktor akses informasi yang mempengaruhi masyarakat dalam mengurus IMB.

B. Rumusan Masalah

Dalam melakukan suatu penelitian, masalah perlu dirumuskan terlebih dahulu agar penelitian dapat memenuhi sasaran obyek yang telah ditentukan, karena tujuan utama penelitian adalah untuk memecahkan suatu masalah.

Sebelum membicarakan lebih lanjut, terlebih dahulu penulis akan mengemukakan pengertian dari masalah, yaitu :

“Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya”⁹

Bertitik tolak pada apa yang diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut :

“Bagaimana pengaruh antara tingkat pendidikan dan akses informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB di Kecamatan Muntilan Tahun 2003 “

C. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis mengharapkan adanya manfaat yang di peroleh oleh penulis sendiri pada khususnya dan masyarakat luas pada

⁹Prof. Dr. Winarno Surabudi, *Metode Penelitian*, P. 117, D. P. 1983, hal. 117

umumnya. Dan secara lebih jelas manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam menghadapi permasalahan di lapangan.
- b. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menentukan langkah-langkah yang harus diambil supaya partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB dapat lebih ditingkatkan lagi.

Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB.
- b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan akses informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB.

D. Kerangka Dasar Teori

Sebelum penulis mengemukakan tentang teori yang dipakai sebagai dasar berpijak dalam mengemukakan konsep pemikiran untuk penelitian, maka terlebih dahulu penyusun mengemukakan definisi teori sebagai berikut :

“ Teori adalah serangkaian konsep definisi dan proposisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis itu dijabarkan dengan variable yang satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena.”¹⁰

Berdasarkan pengertian tersebut maka teori yang penulis kemukakan di bawah ini adalah sekaligus menjadi kerangka pikir bagi penulis untuk memahami, menanggapi, serta menganalisa permasalahan yang hendak diteliti.

¹⁰ Mendi Siregar, *Teori dan Metodologi Penelitian*, (Medan: Pustaka Setia, 2008), hal. 10.

1. Tingkat Pendidikan

Pendidikan yang diperoleh seseorang akan membawa perubahan kearah yang lebih maju baik dalam gaya hidup, tingkah laku, cara bicara juga akan membawa perubahan seseorang agar dapat berpikir dan bertindak secara rasional. Karena kemajuan suatu negara ditentukan oleh kualitas SDM rakyatnya, dan pendidikan dapat meningkatkan mutu dan kualitas dari pada manusia. Pendidikan merupakan wahana yang ampuh untuk membina kepribadian dan mengembangkan kemanusiaan masyarakat Indonesia, baik jasmani maupun rohani sehingga dapat mengangkat harkat martabat masyarakat Indonesia dari belenggu kemiskinan yang dapat menuju pada pencapaian masyarakat adil dan makmur.

Secara umum pendidikan merupakan proses yang terus berlangsung sepanjang hayat dan bentuknya berbeda-beda. Seperti yang dikatakan oleh Soemitro, dalam bukunya Vembrianto bahwa :

“ Pendidikan pada hakekatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan didalam dan diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup “¹¹

Sedangkan pengertian pendidikan menurut Siti Maehati adalah :

“ Merupakan pengaruh dinamis tiap manusia dalam perkembangan jasmani, jiwa perasaan sosial, susila dan sebagainya. Jadi pendidikan adalah pengalaman yang memberikan pengertian pandangan dan penyesuaian dalam atau bagi seseorang yang mengakibatkan dia berkembang “¹²

Dari pendapat-pendapat tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan adalah usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan,

¹¹ Vembrianto, *Pendidikan Sosial*, Paramitra, Yogyakarta, 1981, hal. 1

¹² Siti Maehati, *Pendidikan Sistematis*, Paramitra, Yogyakarta, 1978, hal. 1

sehingga manusia akan lebih mampu menghadapi tantangan dalam hidupnya agar dapat menyesuaikan diri, mempertahankan dan mengembangkan hidupnya.

Sedangkan Sukirin berpendapat bahwa :

“ Pendidikan merupakan suatu usaha membimbing seorang individu agar ia tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, baik pribadi maupun sosial “¹³

Pendidikan sebagai wahana yang dapat mengangkat harkat martabat manusia baik dibidang sosial, ekonomi maupun budaya akan merupakan kunci untuk berkembang tidaknya suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Pembangunan akan berjalan dengan baik jika pendidikan didalam masyarakat dapat dijalankan secara teratur dan terencana sehingga bisa mengubah tingkah laku masyarakat sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Menurut pendapat Vembrianto, bentuk dari pendidikan tersebut adalah :

1. Pendidikan Formal

Pendidikan sekolah yang teratur bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat.

2. Pendidikan Non Formal

Pendidikan yang teratur dengan sadar dilakukan tetapi tidak terlalu ketat dalam mengikuti peraturan-peraturan yang tetap dan ketat.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan yang diperoleh dari pengalaman sehari-hari. Dengan sadar atau tidak sadar sejak seseorang lahir sampai mati di dalam keluarga dalam pekerjaan atau pergaulan sehari-hari.¹⁴

¹³ Sukirin, Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, 1980, hal. 100

Tindakan pendidikan seperti diatas akan dapat menentukan tingkat status seseorang dalam masyarakat, terutama pendidikan formal yang dimiliki seseorang. Bila seseorang mempunyai pendidikan yang tinggi maka kedudukan status sosial yang dimiliki dalam masyarakat cenderung makin tinggi.

2. Akses Terhadap Informasi

Informasi mempunyai peranan penting dalam kehidupan terutama di era globalisasi sekarang ini. Masyarakat dapat mengetahui berbagai peristiwa yang telah terjadi atau yang sedang terjadi melalui informasi.

Informasi menurut Samuel Ellon adalah :

“Sebagai pernyataan yang menjelaskan suatu peristiwa (suatu objek atau suatu konsep) sedemikian rupa sehingga membantu kita untuk membedakan dari yang lain”¹⁵

Informasi adalah bahan pokok dalam komunikasi. Informasi bukan hanya perihal fakta maupun kebenaran, melainkan lebih luas lagi tentang skope, proses dan penggunaan informasi itu sendiri. Gordon B. Davis mengatakan bahwa informasi adalah data yang telah diproses ke dalam suatu bentuk yang mempunyai arti bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata dan terasa bagi keputusan saat itu atau untuk keputusan mendatang.¹⁶

Dari pendapat di atas cukup jelas bahwa informasi adalah satu unsur penting dalam komunikasi. Informasi itu harus dinamis dan dialirkan kepada orang lain. Informasi itu harus bergerak, mudah di mengerti, utuh dan bulat. Informasi itu menginginkan respon dari penerimanya.

¹⁴ Vembrianto, *Pendidikan Sosial*, Paramitra, Yogyakarta, 1981, hal 22-23

¹⁵ Onong Effendy, *Sistem Informasi Manajemen*, Mandar Maju, Surabaya, 1989, hal. 78

¹⁶ R. G. B. Davis, *Principles of Management*, McGraw-Hill, New York, 1957, hal. 100

Dalam era reformasi ini masyarakat menginginkan kebebasan dalam mengakses informasi, terutama informasi dari pemerintah. Selama ini ruang gerak komunikasi antara pemerintah dan masyarakat cenderung kosong sehingga banyak peraturan, kebijakan dan program pemerintah yang kurang tersosialisasikan secara luas kepada masyarakat.

Padahal masyarakat mempunyai hak untuk mengakses berbagai klasifikasi informasi publik yang nantinya akan dijamin dalam Undang-Undang Kebebasan Memperoleh Informasi yang sekarang ini baru dalam tahap Rancangan Undang-Undang. Dengan adanya Undang-Undang ini masyarakat nantinya dapat memperoleh kebebasan dalam memperoleh informasi.

Harold J. Cross, dalam buku *The People's Right to Know, Legal Access to Public Record and Proceedings* menyatakan kebebasan atas informasi menjadi hak yang melekat pada setiap manusia. Justifikasi atas kebebasan informasi tak cukup hanya melalui pengakuan secara filosofis atau lip servis belaka. Hak tersebut sangat fundamental dan harus diatur secara tegas dalam undang-undang.¹⁷

Merujuk pada terbitan Article 19 edisi ketiga, artikel yang dikeluarkan oleh sebuah LSM internasional antisensor yang berbasis di London menegaskan bahwa akses publik untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights*. Yang berarti hak publik atas informasi merupakan nilai universal yang harus dikembangkan di semua negara, di semua masyarakat tanpa terkecuali.

¹⁷ Harold J. Cross, *The People's Right to Know, Legal Access to Public Record and Proceedings* (New York: Basic Books, 1988), hal. 1.

Terbitan ini juga menegaskan bahwa informasi adalah oksigen demokrasi. Artinya, demokrasi bukan sebatas kebebasan setiap warga negara memilih wakil-wakil rakyatnya, melainkan juga kebebasan mendapatkan informasi yang komprehensif tentang kebijakan-kebijakan publik, kinerja para pejabat publik dan proses pemerintahan secara menyeluruh.

Dengan adanya jaminan atas hak memperoleh informasi secara bebas, masyarakat dapat dengan leluasa memperoleh informasi tentang kebijakan publik khususnya informasi mengenai IMB.

Keberhasilan pembangunan di segala bidang sangat tergantung pada peran serta masyarakat, salah satu wujudnya melalui mengurus IMB. Supaya pembangunan berjalan lancar maka diperlukan komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat yang saling timbal balik.

Masyarakat harus diberi kemudahan dalam memperoleh informasi, terutama informasi tentang kebijakan-kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah karena sebagian besar masyarakat kurang berpengalaman. Sehingga dengan mendapat informasi secara mudah maka kesadaran untuk mengurus IMB akan meningkat. Penyampaian informasi mengenai IMB harus memperhatikan kondisi masyarakat, karena dengan memperhatikan kondisi masyarakat, masyarakat dapat dengan mudah menerima informasi tersebut.

Disamping itu, penyuluhan-penyuluhan tentang IMB juga harus dilakukan secara intensif dan terpadu supaya masyarakat mengetahui tujuan dan manfaat dari IMB secara jelas. Dengan adanya penyuluhan-penyuluhan diharapkan pemahaman masyarakat akan bertambah mengenai IMB.

sehingga timbul kesadaran untuk mengurus IMB sebagai bagian untuk melancarkan atau mensukseskan pembangunan.

3. Partisipasi Masyarakat

Program pembangunan akan berhasil bila melibatkan partisipasi dari semua pihak, baik dari aparat pemerintah, masyarakat dan penggunaan fasilitas-fasilitas yang tersedia. Jadi keberhasilan program pembangunan sangat tergantung dari partisipasi semua pihak yang berkepentingan.

Gardon W. Allport menyatakan bahwa :

“Seseorang yang berpartisipasi sebenarnya mengalami keterlibatan dirinya atau egonya yang sifatnya lebih dari pada keterlibatan dalam pekerjaan tugas saja. Dengan keterlibatan dirinya berarti keterlibatan pikiran dan perasaannya.”¹⁸

Definisi partisipasi adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program (pembangunan) sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan diri sendiri.¹⁹ Ini menyiratkan adanya kemampuan untuk menilai potensi diri dan masyarakat sendiri bagi pencapaian tujuan pembangunan.

Dari pendapat diatas dapat di ketahui bahwa dalam partisipasi terdapat keterlibatan mental dan emosi seseorang dalam suatu aktivitas yang kemudian bertanggung jawab atas aktivitas yang mereka lakukan untuk tujuan bersama.

Dalam berpartisipasi diperlukan kesadaran yang baik dari setiap individu, seperti yang dikemukakan oleh Santoso tentang partisipasi masyarakat

¹⁸ Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, dan Disiplin dalam Pemabangunan Nasional*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1986, hal. 12

¹⁹

sebagai keterlibatan yang bersifat spontan yang disertai dengan kesadaran dan bertanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk tujuan bersama.²⁰

Sedangkan pendapat Moebyarto tentang partisipasi adalah :

“Sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program (pembangunan) sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri sendiri.”²¹

Jadi keterlibatan masyarakat dalam mengurus IMB bukan hanya sebagai kewajiban saja tetapi merupakan suatu kesadaran tersendiri yang di sertai tanggung jawab penuh untuk mensukseskan roda pembangunan.

Dengan adanya keterlibatan masyarakat secara emosional, diharapkan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik karena masyarakat ikut berpartisipasi mengurus IMB dengan kesadaran atau atas kemauan sendiri.

Dari beberapa pendapat tentang partisipasi di atas terdapat hal pokok yang dikemukakan. Hal pokok dari partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam mendukung maupun membiayai setiap program pembangunan. Dan partisipasi dalam penelitian ini, difokuskan pada kewajiban masyarakat dalam mengurus IMB.

Akhirnya, partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB sangat diperlukan untuk membiayai pembangunan yang sedang, akan dilakukan demi terwujudnya masyarakat yang makmur material dan spritual agar dapat menyongsong globalisasi yang berkembang dengan pesat.

²⁰ Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Penerbit Alumni Bandung, Bandung, 1986, hal. 39

²¹ Moebyarto, *...*

memperhatikan kondisi masyarakat tersebut dengan memberi kemudahan-kemudahan pada masyarakat mengenai informasi IMB.

Dengan adanya kemudahan-kemudahan dalam memperoleh informasi mengenai IMB diharapkan pengetahuan masyarakat mengenai IMB meningkat sehingga timbul kesadaran untuk berpartisipasi mengurus IMB. Sehingga penerimaan dari IMB akan bertambah sehingga dapat melancarkan pembangunan.

Jadi dengan pendidikan yang tinggi akan mempengaruhi masyarakat dalam mengurus IMB, karena dengan pendidikan dan pengetahuan yang tinggi maka pemahaman masyarakat tentang IMB juga meningkat. Yang didukung dengan kemudahan-kemudahan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang IMB dan adanya penyampaian informasi yang baik dari pemerintah tentang IMB sehingga akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB. Sehingga dengan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB akan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat melancarkan pembangunan di segala bidang.

E. Hipotesa

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai arti dari hipotesa maka terlebih dahulu penulis akan mengutip pendapat dari Koentjoroningrat tentang arti hipotesa ;

“ Hipotesa merupakan suatu rumusan yang menyatakan adanya hubungan antara dua fakta atau lebih. Dan hipotesa ini mempunyai sifat sementara yang harus diuji kebenarannya.”

diganti dengan hipotesa lain. Karena tergantung dari masalah yang diteliti dan teori yang dipakai²²

Jadi hipotesa disini dapat diartikan sebagai dugaan-dugaan sementara yang mengarahkan jalannya penelitian dan dapat juga disebut sebagai sebuah kesimpulan yang belum final karena dapat diubah atau diganti sehingga masih perlu pembuktian akan kebenarannya. Dari penjelasan diatas maka hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang diajukan yang mempunyai dua kemungkinan benar dan salah.

Melihat uraian diatas maka penyusun akan merumukan hipotesa dalam penulisan ini yaitu :

a. Hipotesa Mayor

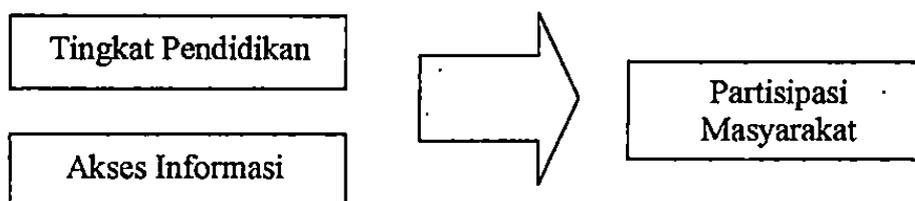
- Ada pengaruh antara tingkat pendidikan dan akses informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB.

b. Hipotesa Minor

- Ada pengaruh tingkat pendidikan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB.

- Ada pengaruh akses informasi terhadap partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB.

2. Hipotesa Geometrik



²² Yudianto, *Metode Metode Penelitian Masyarakat*, PT Gramedia, Jakarta, 1987, hal 26

F. Definisi Konseptual

Sebagai pedoman dalam pembuatan definisi konsep, terlebih dahulu penulis menulis arti dari definisi konsep ;

“ Definisi konsep adalah pembuatan pengertian suatu konsep yang menggunakan konsep lain yang dikira mudah dimengerti atau juga disebut “WORD WITH DEFINITION” atau mendefinisikan kata-kata²³

Dari penjelasan diatas maka penulis dapat membuat definisi konsep sebagai berikut :

1. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha manusia mencari ilmu yang dilakukan secara sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuannya baik didalam atau diluar sekolah yang berlangsung seumur hidup.

2. Akses Terhadap Informasi

Kebebasan dan kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi tentang IMB dan mengakses informasi tentang IMB secara leluasa serta kesempatan dan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan informasi tentang IMB melalui berbagai sumber informasi.

3. Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan masyarakat sebagai pihak yang wajib mengurus IMB secara emosional, mental dan fisik yang berkewajiban untuk melancarkan atau

²³ Prof. Dr. Winarno Surachmad, *Pengantar Metode Penelitian Terapan*, Bandung, 1972, hal. 42

mensukseskan roda pembangunan dengan mengurus IMB sesuai dengan ketentuan atau prosedur yang telah ditetapkan.

G. Definisi Operasional

Guna mengumpulkan data-data yang lebih valid, maka indikator-indikator yang ada pada tingkat pendidikan, akses informasi dan partisipasi secara operasional dapat diukur sebagai berikut :

1. Tingkat pendidikan dapat dilihat dari berbagai aspek yang mendukung, hal ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. Pendidikan Formal

Segi-segi yang diukur dalam indikator ini yaitu :

- Pendidikan SD
- Pendidikan SMP
- Pendidikan SMU
- Pendidikan Perguruan Tinggi atau Universitas

- b. Pendidikan Non Formal

Segi-segi yang dapat diukur dalam indikator ini yaitu :

- Kursus
- Penataran

- c. Pendidikan Informal

Segi-segi yang dapat diukur dalam indikator ini yaitu :

H. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada penelitian lapangan, yaitu mengungkapkan hal-hal baru yang belum diketahui sebelumnya, dengan tidak mengesampingkan study kepustakaan sebagai penunjang.

Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana data-data diperoleh dari responden dengan teknik sampel yang dijaring melalui questioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dan penelitian ini adalah penelitian survey, yang mempunyai maksud untuk menjelaskan hubungan kausal antara variabel bebas dengan variabel terikat melalui pengujian hipotesa.²⁴

2. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah sejumlah penduduk atau individu yang paling sedikit mempunyai sifat yang sama.²⁵ Populasi dapat juga diartikan sebagai keseluruhan objek penelitian yang diteliti dengan ciri-ciri atau sifat tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah kepala rumah tangga di Kelurahan Gunungpring I Kecamatan Muntilan yang berjumlah 678 jiwa.

b. Sampel

Sampel adalah beberapa orang yang dijadikan responden dalam

²⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta, 1989, hal 3-5.

²⁵ Sutrisno Hedi, *Metodologi Penelitian*, Departemen Fakultas Pendidikan UGM, Yogyakarta, 1979, hal

Penelitian. Pengambilan sampel yang dilakukan oleh penulis adalah random sampling yaitu pengambilan responden secara acak dimana masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi sampel. Sampel dilakukan dengan mengambil kepala rumah tangga yang ada di Kelurahan Gunungpring I Kecamatan Muntilan yang mempunyai bangunan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis yakni sumber dana, waktu dan tenaga. Oleh karena itu penelitian hanya dilakukan terhadap sebagian saja populasi.

Sehingga dalam penelitian ini responden yang diambil sebanyak 60 kepala rumah tangga yang mempunyai bangunan, yang tinggal di Kelurahan Gunungpring I Kecamatan Muntilan. Pengambilan jumlah sampel ini didasarkan pada pendapat dari Ida Bagus Mantra, yang mengatakan bahwa :

“ Besarnya sampel yang harus diambil untuk mendapatkan data yang representatif, beberapa peneliti menyatakan besarnya sampel tidak boleh kurang dari 10% jumlah populasi, tapi ada juga ahli yang menyatakan sampel minimal 5% dari jumlah satuan elementer dari populasi”.²⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik interview, observasi, kuesioner dan dokumentasi. Keempat teknik ini mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing, oleh karena itu keempat teknik ini digunakan agar saling melengkapi satu sama lainnya.

²⁶ Ida Bagus Mantra, *Statistika Untuk Kelangkaan*, 1992, Bandung, PPSK, hal. 111

Adapun pengertian dari masing-masing teknik tersebut diatas adalah :

1. Teknik Observasi

Adalah suatu metode melalui pengamatan dan pencatatan secara praktis, sistematis dan secara langsung ke gejala subyek yang diselidiki.

2. Teknik Wawancara

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan wawancara dua orang atau lebih secara fisik terhadap responden dengan berhadapan langsung dan masing-masing menggunakan komunikasi secara wajar dan lancar.

3. Teknik Kuesioner

Adalah suatu metode pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang-orang yang menjadi obyek penelitian.

4. Teknik Dokumentasi

Adalah suatu metode pengumpulan data berdasarkan sumber-sumber catatan atau arsip-arsip yang tersimpan.

4. Teknik Penentuan Skor

Untuk mengklasifikasikan data atau informasi yang didapat dari responden melalui jawaban kuesioner, maka setiap pertanyaan diberi skor empat item jawaban. Sesuai dengan jumlah item jawaban dapat ditentukan skornya yaitu sebagai berikut, bila responden menjawab a maka skornya 4 dan bila menjawab b skornya 3, c skornya 2 dan bila menjawab d maka skornya 1, sedangkan yang tidak memberi jawaban diberi skor nol.

Untuk menentukan variabel atau sub variabel ke dalam klasifikasi rendah, sedang dan tinggi akan digunakan skala interval yang rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Skala Interval} : \frac{\text{skortertinggi} - \text{skorterendah}}{\text{itemjawaban}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, maka dapat diketahui skala interval sebagai berikut :

$$\frac{4-1}{4} = 0,75$$

Jadi berdasarkan interval tersebut, maka klas interval (kategori) dari jawaban responden dapat diketahui sebagai berikut :

1. 3,26 – 4,00 : termasuk kategori sangat tinggi
2. 2,51 – 3,25 : termasuk kategori tinggi
3. 1,76 – 2,50 : termasuk kategori rendah
4. 1,00 – 1,75 : termasuk kategori sangat rendah

Dengan menggunakan klas kategori tersebut maka besarnya rata-rata total skor jawaban setiap responden atas pertanyaan yang diajukan dapat diketahui

5. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisa data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik analisa data sebagai berikut :

1. Analisa Regresi Berganda

Untuk mengetahui besarnya hubungan perubahan antara variabel yang satu dengan variabel lainnya maka digunakan teknik analisa regresi berganda yang rumusnya disambungkan dengan persamaan garis sebagai berikut ²⁷:

$$\beta_0 = Y - \beta_1 X_1 - \beta_2 X_2$$

Keterangan :

Y = harga variabel tergantung

β_0 = Konstanta regresi

β_1, β_2 = Koefisien regresi

X1 , X2 = variabel pengaruh

Untuk mengetahui signifikan atau tidaknya masing-masing koefisien regresi atau untuk mengetahui signifikan atau tidaknya masing-masing hipotesa minor yaitu “Adakah pengaruh yang signifikan dari tingkat pendidikan (X1) terhadap partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB (Y)” dan hipotesa minor 2 yaitu “Adakah pengaruh yang signifikan antara akses informasi (X2) terhadap

partisipasi masyarakat dalam mengurus IMB (Y)". Dapat dihitung terlebih dahulu dihitung dengan T test yang rumusnya sebagai berikut :

$$T \text{ test} = \frac{b}{S_b}$$

Kriteria yang digunakan :

- Jika T test lebih besar atau sama dengan T tabel pada tingkat kepercayaan 95 % maka koefisien regresi tersebut signifikan.
- Jika T test lebih kecil dari T tabel pada tingkat kepercayaan 95 % maka koefisien regresi tersebut tidak signifikan.

Kemudian untuk mengetahui signifikan atau tidaknya kedua variabel bebas terhadap variabel tergantung secara bersama-sama digunakan F test dengan

Kriteria yang digunakan :

- jika F_{test} lebih besar atau sama dengan F_{tabel} pada tingkat signifikan 5 % maka signifikan

Nilai F_{test} = 11,11 > 2,10 = F_{tabel} maka signifikan